

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

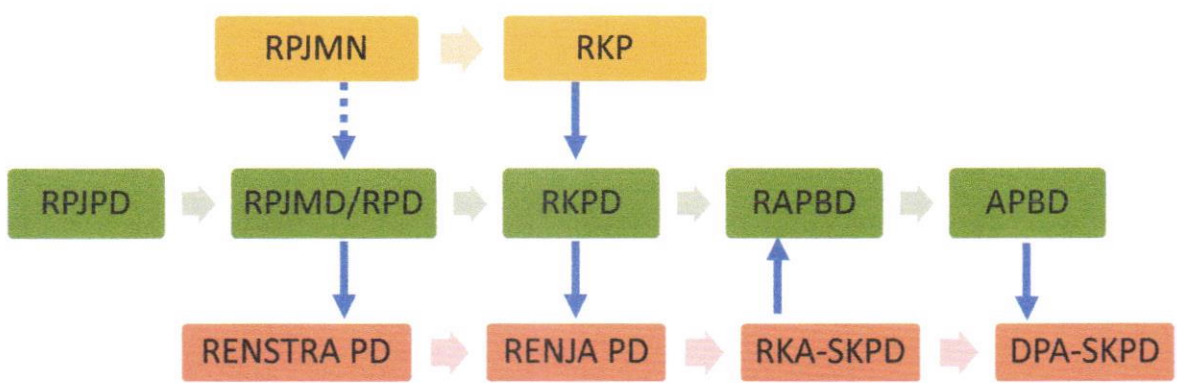
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.1
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

---> diperhatikan

—> dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan - Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

- a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024;
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024; dan
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-	95%	90%	90%	90%	-	-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-	100%	85%	100%	100%	-	-	-

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	100%	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	-	100%	7 laporan	7 laporan	100%	-	-	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	-	100%	100%	90%	90%	-	-	-
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	-	100%	12 bulan	11 bulan	92%	-	-	-
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	-	100%	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen permintaan pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	-	100%	80%	80%	100%	-	-	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APIP yang mengikuti pelatihan	-	100%	45 orang	31 orang	68%	-	-	-
				Terlaksananya senam secara rutin	-	70%	11 bulan	9 bulan	81%	-	-	-
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	-	100%	-	-	-	-	-	-
				Jumlah pendampingan yang dilakukan	-	100%	-	-	-	-	-	-
				Jumlah peserta bimtek	-	100%	40 orang	120 orang	300%	-	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	-	100%	90%	90%	100%	-	-	-
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	-	100%	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kebutuhan kantor yang diadakan	-	100%	16 buah	16 buah	100%	-	-	-

				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	-	100%	2 jenis	2 jenis	100%	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	-	100%	25 jenis	36 jenis	144%	-	-	-
					Tersedianya makan dan minum	-	100%	11 bulan	10 bulan	92%	-	-	-
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	-	83%	4 jenis cetakan dan 6.520 penggandaan	7 jenis cetakan dan 13.773 penggandaan	100%	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang diadakan	-	100%	-	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan	-	90%	11 bulan	10 bulan	92%	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang diadakan	-	90%	11 bulan	10 bulan	92%	-	-	-
					Jumlah rapat koordinasi yang	-	83%	36 kegiatan	31 kegiatan	86%	-	-	-

					dilaksanakan/dihadiri								
					Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	-	100%	-	-	-	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	-	100%	80%	80%	100%	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	-	100%	9 buah	3 jenis	33%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	-	90%	90%	95%	95%	-	-	-
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	-	92%	800 surat	2507 surat	313%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan telepon	-	90%	12 bulan	11 bulan	92%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan	-	90%	12 bulan	11 bulan	92%	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	-	88%	90%	100%	100%	-	-	-

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laik fungsi								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	100%	15 unit	15 unit	100%	-	-	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	50%	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	81%	9 unit	29 unit	322%	-	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	-	100%	1200m2	1200m2	100%	-	-	-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan	-	90%	100%	100%	90%	-	-	-
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	-	88%	100%	100%	100%	-	-	-
			Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	-	100%	8 OPD	8 OPD	100%	-	-	-
			Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	-	90%	10 OPD	10 OPD	100%	-	-	-

				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah dokumen LPPD yang direviu	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LKPD yang direviu	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
					Jumlah OPD yang direviu	-	100%	30 OPD	30 OPD	100%	-	-	-
					Jumlah dokumen RKA PD	-	100%	50 dokumen	50 dokumen	100%	-	-	-
				Pengawasan Desa	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	-	100%	40%	40%	100%	-	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Gelar Pengawasan yang dilakukan	-	100%	1 kali	-	0%	-	-	-
					Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Sisdurwas	-	30%	-	-	-	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	-	100%	100%	96.66%	96.66%	-	-	-
					Jumlah evaluasi yang dilakukan	-	75%	4 kali	4 kali	100%	-	-	-
					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	-	80%	95%	-	-	-	-	-

			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	-	90%	95%	95%	100%	-	-	-
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelimpahan kasus yang ditangani	-	85%	90%	90%	90%	-	-	-
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus pengaduan yang ditangani	-	90%	96%	96%	100%	-	-	-
				Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	-	100%	10 OPD	10 OPD	100%	-	-	-
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	-	80%	80%	80%	100%	-	-	-
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	-	100%	-	-	-	-	-	-
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
			Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan	-	80%	85%	85%	100%	-	-	-

					asistensi									
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi dan pemantauan SPIP	-	45%	30 dokumen	33 dokumen	110%	-	-	-
						Jumlah ekspose pengawasan komprehensif	-	20%	-	-	-	-	-	-
						Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi	-	100%	52 dokumen	52 dokumen	100%	-	-	-
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	-	100%	30 OPD	33 OPD	110%	-	-	-
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verivikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-
						Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	58%	14 OPD	14 OPD	100%	-	-	-
						Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	-	91%	6 bulan	6 bulan	100%	-	-	-

				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	-	100%	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	--	---	------	---	---	---	---	---	---

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkan Pemetaan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	-	-	-	-	85%	85%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	7 laporan	-	-	-	-	7 laporan	7 laporan	100%

					kinerja SKPD									
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	-	-	-	-	-	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	95%	-	-	-	-	100%	100%	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bln	-	-	-	-	54 orang/bln	54 orang/bln	100%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	108 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6 laporan	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	-	-	-	-	80%	80%	100%
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	54 paket	-	-	-	-	162 paket	162 paket	100%
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	54 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan	54 orang	-	-	-	-	54 orang	54 orang	100%

				dan Fungsi	fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan								
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	54 orang	-	-	-	-	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	-	-	-	-	54 orang	54 orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	-	-	-	-	9 paket	9 paket	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	5 paket	-	-	-	-	3 paket	3 paket	100%

					disediakan								
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	-	-	-	-	2 paket	2 paket	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	-	-	-	-	36 laporan	36 laporan	100%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	-	-	-	85%	85%	100%

			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	-	-	-	-	35 unit	35 unit	100%
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	-	-	-	-	94 unit	94 unit	100%
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	90%	-	-	-	-	90%	90%	100%

			Pemerintahan Daerah	laik fungsi								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	-	-	-	-	15 unit	15 unit	100%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	-	-	-	-	30 unit	30 unit	100%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	-	-	-	-	45 unit	45 unit	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	-	-	-	-	16 unit	16 unit	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	-	-	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
				Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	30 OPD	-	-	-	-	-	-	-

				Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%	-	-	-	-	-	-	-
			Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	-	-	-	-	8 laporan	8 laporan	100%
			Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	-	-	-	-	10 laporan	10 laporan	100%
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	-	-	-	-	119 laporan	119 laporan	100%
			Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	-	-	-	-	75 laporan	75 laporan	100%
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	-	-	-	-	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
			Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%

			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP								
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	-	-	-	-	-	95%	95%	100%
				Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	8 laporan	-	-	-	-	-	-	-
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	-	-	-	-	8 laporan	8 laporan	100%
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	-	-	-	-	20 laporan	20 laporan	100%
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	-	-	-	-	-	80%	80%	100%
				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (<i>Fraud Control Planning</i>)	10%	-	-	-	-	-	-	-

			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
				Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	-	-	-	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	-	-	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
			Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	-	-	-	-	-	90%	90%	100%
				Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	52 OPD	-	-	-	-	-	-	-
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	50 OPD	-	-	-	-	50 OPD	50 OPD	100%

					pemerintahan daerah								
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	30 OPD	-	-	-	-	30 OPD	30 OPD	100%
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	-	-	-	-	50 OPD	50 OPD	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	Tinggi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	90%	Tinggi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	80%	Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan

dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti			√	85,5%	86%	85,5%	-	-	98,23%	97,64%	92,46%	-	-	
2	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai			√	95%	95%	95%	-	-	96,2%	95,98%	94,17%	-	-	
3	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A	√			10%	15%	20%	-	-	18%	40%	16%	-	-	
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik			√	90%	90%	90%	-	-	94,11%	96,77%	96,66%	-	-	
5	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	85%	90%	-	-	88,03%	85,03%	78,52%	-	-	
6	Level Kapabilitas APIP			√	2	2	2	3	3	2	2	2	2	-	
7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		√		NA	NA	NA	28%	30%	NA	NA	NA	30%	-	

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian	Proyeksi
					Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		√		30%	-	30%
2	Level Kapabilitas APIP			√	3	-	3

2.3. Deskripsi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

No	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan
1	Peningkatan kapasitas Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan Penjamin Kualitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi/Pendampingan dan Asistensi
2	Penyusunan Prosedur kerja (Tools) implementasi sistem pengawasan Daerah	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi/Pendampingan dan Asistensi
3	Inovasi pengawasan daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.4. Deskripsi tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada indikator RPJMD yaitu: Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator kinerja sasaran inspektorat tahun 2019-2021 yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti;
- 2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;
- 3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A;
- 4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;
- 5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai;
- 6) Level kapabilitas APIP.

Pada perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023, terdapat perubahan indikator kinerja utama pada tahun 2022. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2022 yaitu “Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart”. Pencapaian kinerja inspektorat dalam kurun waktu 2019-2022 diuraikan dalam **tabel 2.5**.

2.5. Deskripsi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dalam pengawasan internal dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang mempunyai indikator tujuan nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada level 3 (Nilai: 3,111) pada tahun 2022. Level tersebut meningkat pada tahun 2022 setelah hasil ekspose dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terakhir tahun 2018 yaitu masih pada level 2.

Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan Skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,111, Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2,720 dan Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,050. Hal tersebut disebabkan atas beberapa hal antara lain:

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP :

1. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja pemerintah daerah yang belum memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
2. Terdapat sasaran strategis perangkat daerah memiliki target dan indikator kinerja yang tidak terkait dengan sasaran strategis Pemda;
3. Terdapat rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan belum berorientasi hasil;
4. Terdapat indikator kinerja belum ditetapkan dengan tepat dan target kinerja belum mempertimbangkan target kinerja level diatasnya;

5. Sistem pengumpulan data kinerja masih belum memadai sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak andal;
6. Target indikator kinerja perangkat daerah masih ada yang belum spesifik/belum jelas sehingga capaian kinerja tidak dinilai;
7. Sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator dan targetnya masih ada yang belum ditetapkan dengan tepat dan baik serta keandalan data hasil capaian kinerja belum andal.

b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

1. Belum mengalokasikan sumberdaya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko;
2. Belum seluruh OPD memutakhirkan dokumen penilaian risiko secara berkala;
3. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang belum memadai;
4. Belum dilakukan monitoring efektifitas tindak pengendalian;
5. APIP belum melakukan reviu proses manajemen risiko serta monitoring pada seluruh OPD secara berkala.

c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1. Pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi belum memadai;
2. Alokasi sumberdaya untuk aktivitas pengelola risiko korupsi belum memadai;
3. Sebagian besar OPD belum melakukan penilaian risiko korupsi.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada Level 2 dan belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standart audit. Terlihat juga dari masih banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah. Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi

resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

2.6. Deskripsi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

1) Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku;
- c. Rendahnya nilai Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD;
- e. Kapabilitas pengawasan internal pemerintah belum berada pada level 3, maka perlu meningkatkan *quality assurance* dan *consulting* pada APIP.

2) Peluang

1. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi melalui program (Monitoring Control for Prevention) MCP, Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;

4. Dukungan dari Inspektorat Provinsi dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
5. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
6. Sinergisitas APIP dengan APH.

2.7. Deskripsi kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik, tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pada kegiatan pemeriksaan internal secara berkala, kegiatan penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan Probity Audit

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Inspektorat Daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan”

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaiki, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2022

[illegible]

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
	Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2	2	2	3	Inspektorat

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2022

2.8 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu laju inflasi Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 sebesar 5,76%. Inflasi Kabupaten Nganjuk banyak dipengaruhi oleh fluktuasi sektor transportasi sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Ekonomi yang tumbuh dengan inflasi yang terkendali menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Nganjuk dan nasional tumbuh minus dikarenakan puncak pandemic COVID-19. Pada tahun 2022, ini ekonomi tumbuh 4,84% sedangkan laju inflasi 5,76%. Laju inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih tingginya faktor-faktor produksi atas barang dan jasa.

2.9 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	13.593.043,515	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	13.593.043,515	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	49.540	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	49.540	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	7.810	Penyusunan Dokumen	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	7.810	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah	Kab.Nganjuk	perencanaan perangkat daerah			Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Nganjuk	perencanaan perangkat daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6.085	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6.085	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.085	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	1 dokumen	6.085	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.085	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.085	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.085	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.085	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	11.305	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	11.305	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	1 laporan	6.085	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	1 laporan	6.085	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah					daerah			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 dokumen	17.730	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 dokumen	17.730	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.440	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.440	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.440	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.440	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	1 laporan	2.440	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	1 laporan	2.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		k	Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD				k	Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	8.440	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	8.440	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.970	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.970	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 dokumen	9.570.586,821	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 dokumen	9.570.586,821	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	9.479.709,321	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	9.479.709,321	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	58.680	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	58.680	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen	6.085	Koordinasi dan Pelaksanaan	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen	6.085	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD	Kab.Nganjuk	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			Akuntansi SKPD	Kab.Nganjuk	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.842,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.842,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester	6 laporan	11.270	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester	6 laporan	11.270	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		steran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55 dokumen	693.397,620	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55dokumen	693.397,620	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	57.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	57.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	6.995	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	6.995	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	552.806,620	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	552.806,620	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	55 orang	76.396	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	55 orang	76.396	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			undangan					perundang-undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	51 dokumen	551.426,275	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	51 dokumen	551.426,275	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	29.097,130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	29.097,130	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	13.902,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	13.902,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.759	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.759	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	188.706,195	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	188.706,195	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	32.478,850	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	32.478,850	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 dokumen	12.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 dokumen	12.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			disediakan					undangan yang disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.032,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.032,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	246.450	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	246.450	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	73 unit	1.719.456,499	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	73 unit	1.719.456,499	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	659.482,2 14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	659.482,2 14	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	261.335,2 50	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	261.335,2 50	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	798.639,0 35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	798.639,0 35	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	305.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	305.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	198.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	198.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	97.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	97.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	94 unit	685.106,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	94 unit	685.106,300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 unit	197.606,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	15 unit	197.606,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional atau Lapangan		yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	15.750	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	15.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	95.356,100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	95.356,100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire	4 unit	376.394	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	4 unit	376.394	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			habilitasi					dipelihara/ di rehabilitasi			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	741.659,162	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	741.659,162	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	30 OPD	663.924,162	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	30 OPD	663.924,162	
			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%				Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%				Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%		
			Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%				Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	215.514	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	215.514	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	30.270	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	30.270	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	79.518	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	79.518	
	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	60.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	60.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	32.610,302	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	32.610,302	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil monitoring dan	6 dokumen	246.011,860	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil	6 dokumen	246.011,860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	k	evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	k	monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	8 laporan	77.735	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	8 laporan	77.735	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah laporan penyelesaian kerugian	4 laporan	14.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah laporan penyelesaian kerugian	4 laporan	14.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		k	negara/daerah yang ditangani				k	negara/daerah yang ditangani			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	63.735	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	63.735	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	10%	1.004.981	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	10%	1.004.981	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 kegiatan	249.682	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar	2 kegiatan	249.682	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								operasional			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	160.432	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	160.432	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	89.250	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	89.250	
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan	52 OPD	755.299	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang mendapka	52 OPD	755.299	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		k	pendampingan dan asistensi				k	n pendamping an dan asistensi			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	325.822	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	325.822	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian	52 OPD	46.670	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian	52 OPD	46.670	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			reformasi birokrasi					reformasi birokrasi			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	349.107	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	349.107	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	33.700	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	33.700	

2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3,150
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

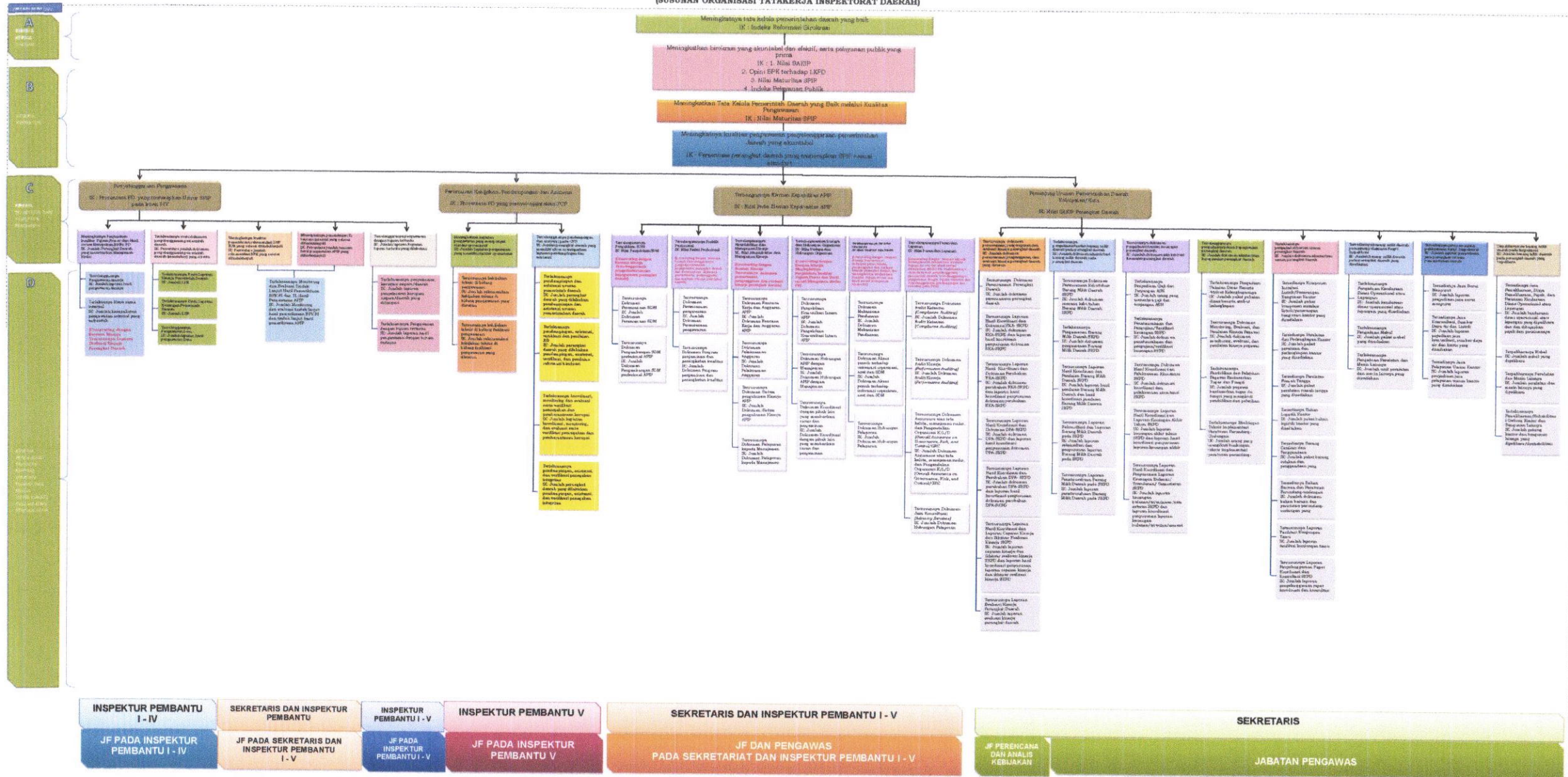
Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

a. Kerangka Logis Kinerja Inspektorat Daerah

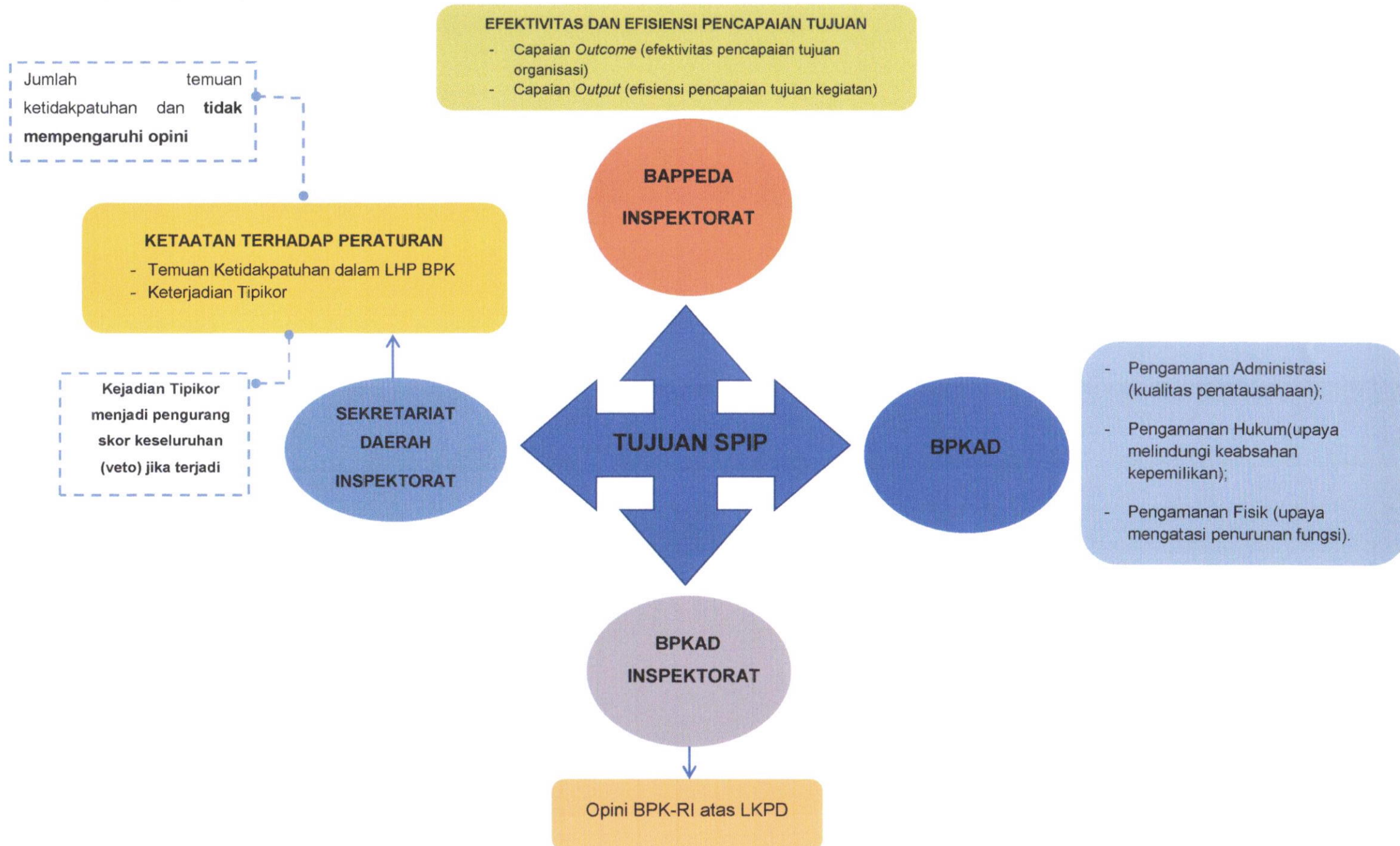


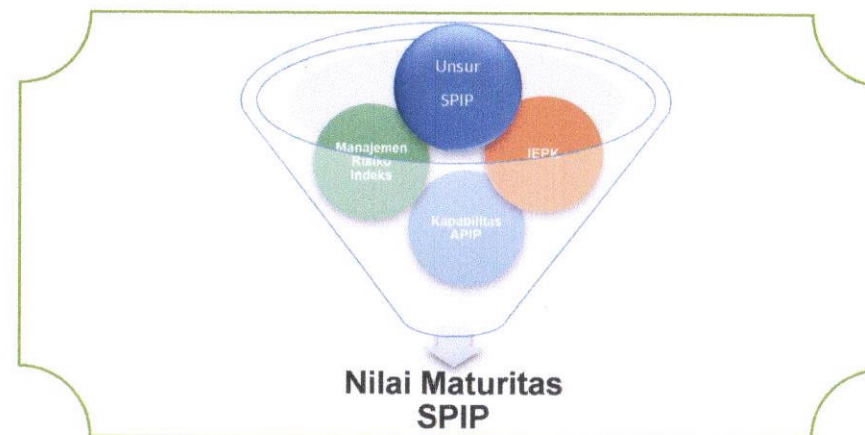
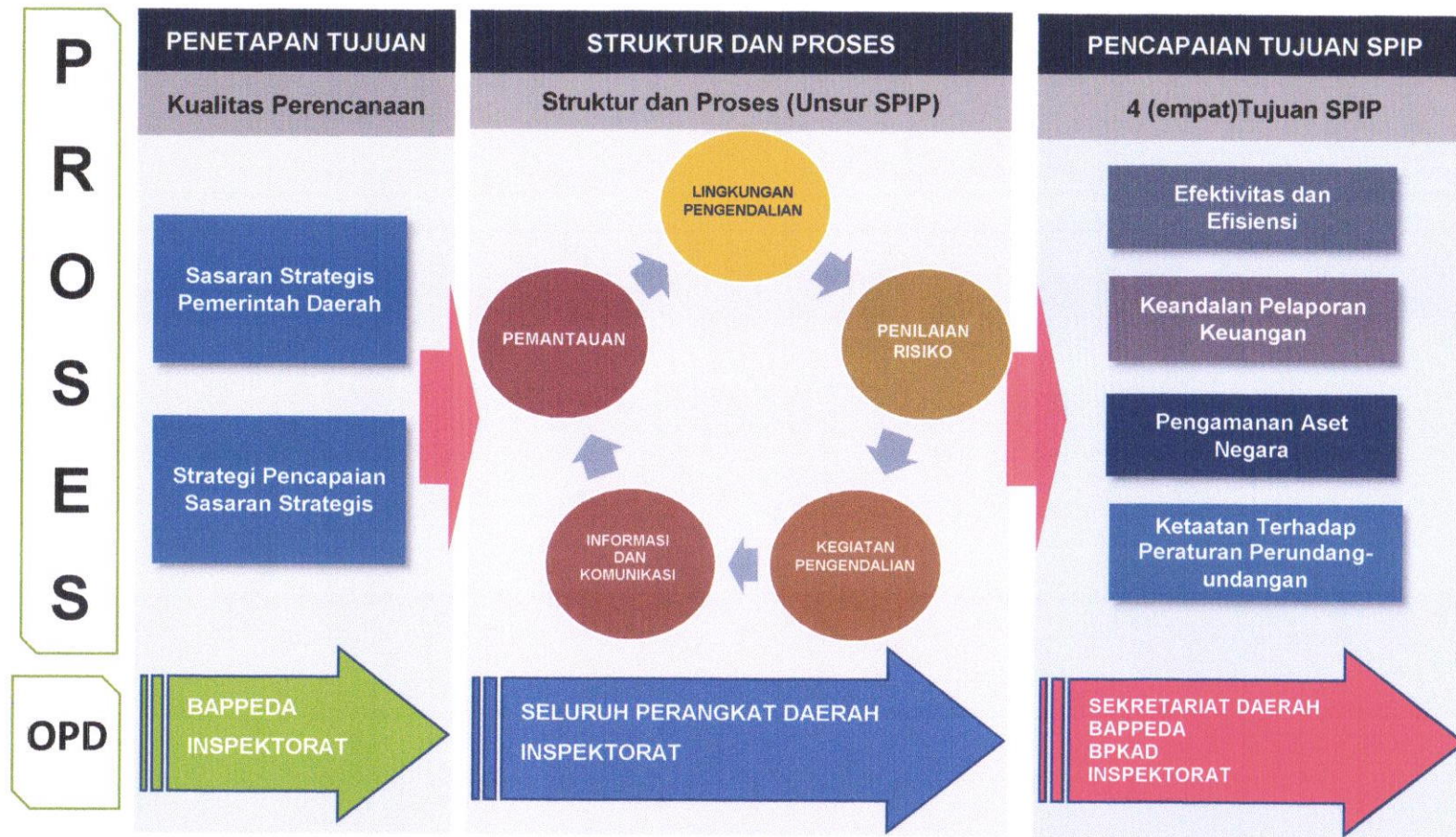
b. *Cascading* Kinerja Inspektorat Daerah

Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
(Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah)
(Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)
(SUSUNAN ORGANISASI TATAKERJA INSPEKTORAT DAERAH)



c. Crosscutting Kinerja Inspektorat Daerah



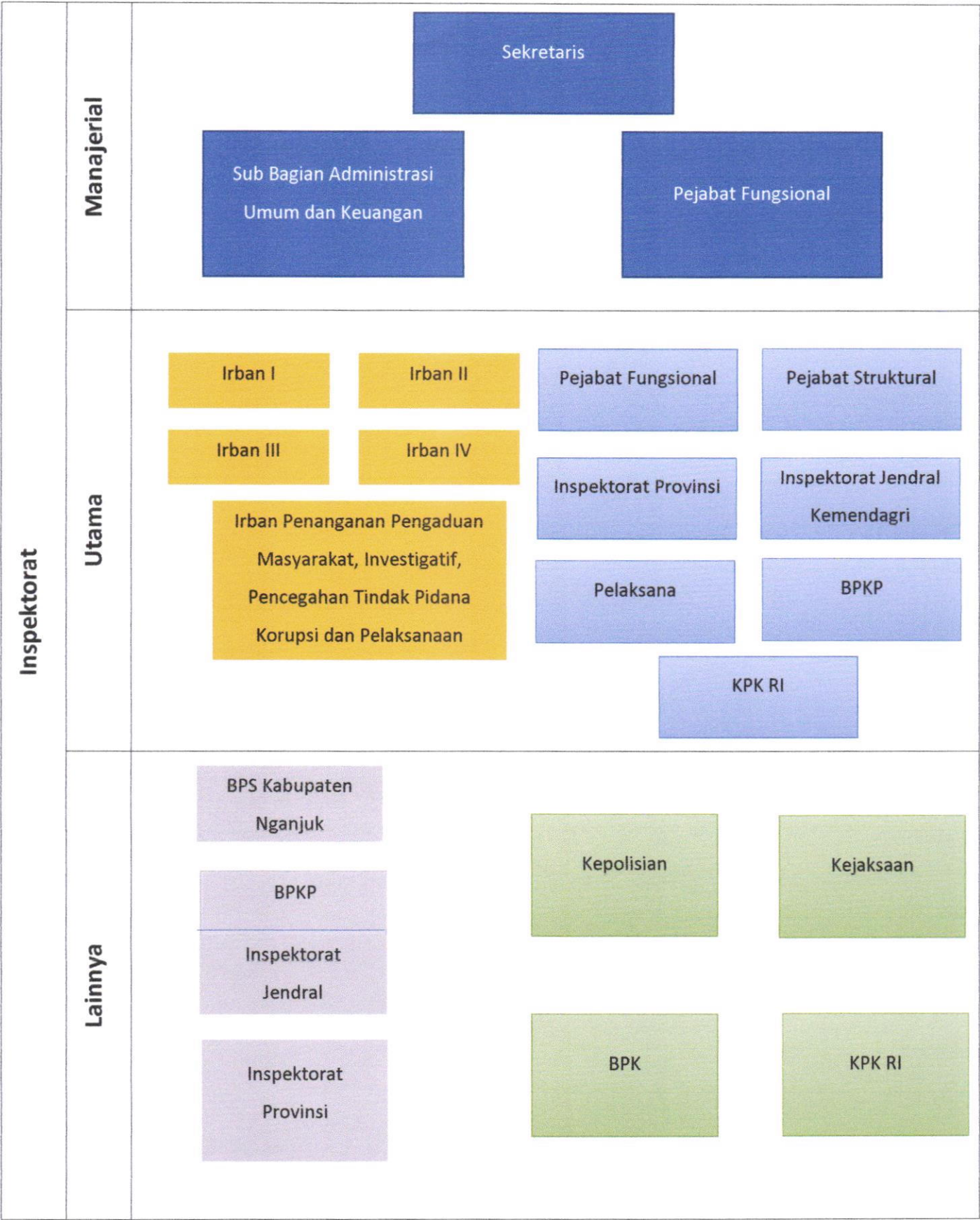


Alur Crosscutting Berorientasi Hasil

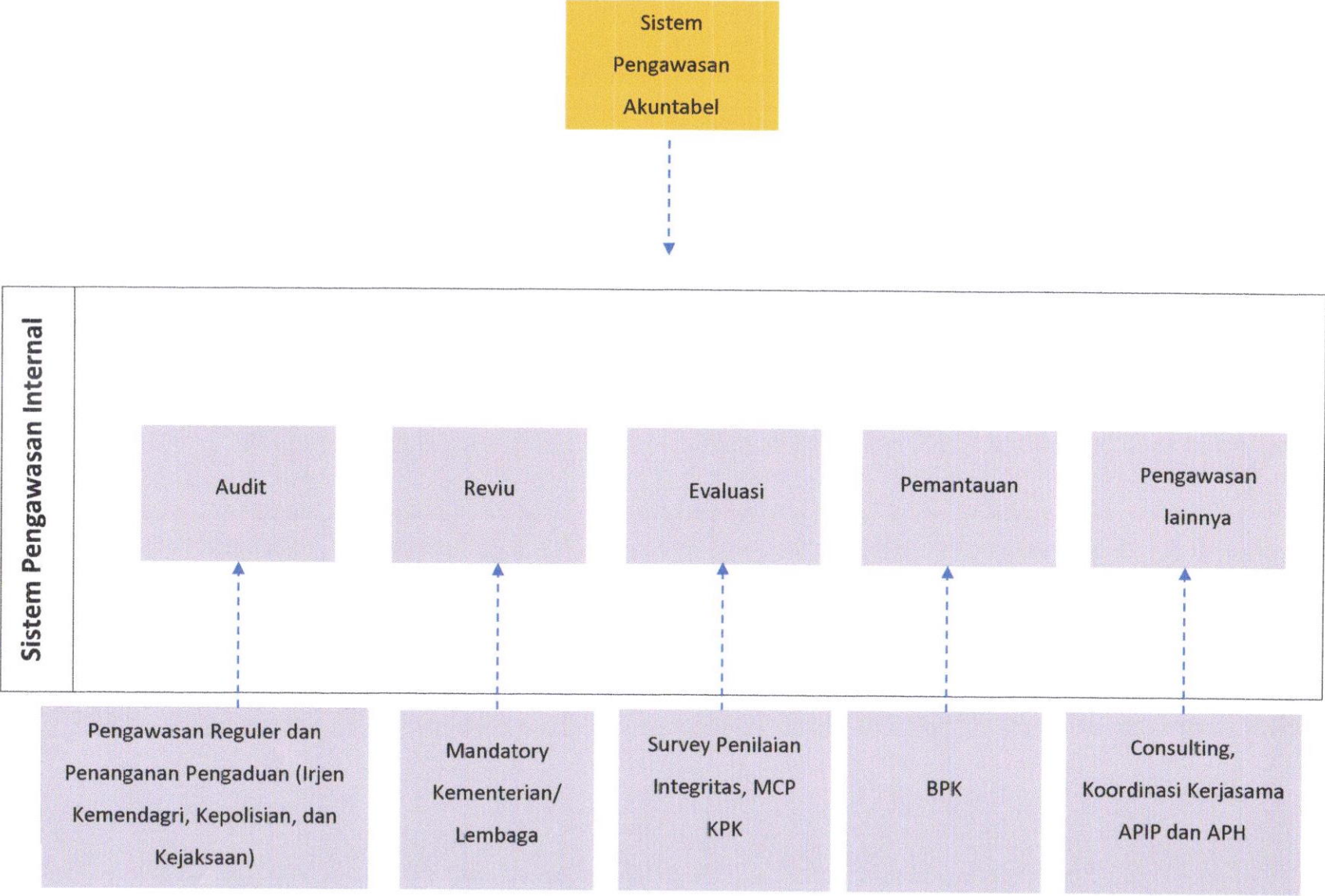
d. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah

PROSES UTAMA

Inspektorat	Manajerial	Administrasi Umum dan Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
	Utama	Sistem Pengawasan Akuntabel Peningkatan Kapabilitas APIP
	Lainnya	Korsupgah MCP KPK Survey Penilaian Integritas (KPK RI) Penanganan Kasus Pengaduan (Kepolisian dan Kejaksaan) Fasilitator (Inspektorat Jendral Kemendagri, Inspektorat Prov, BPKP, Inspektorat, Daerah Lain, KPK RI,dan Kementerian Pusat)



SISTEM PENGAWASAN AKUNTABEL



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Visi Kabupaten Nganjuk yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2024 yaitu “Nganjuk yang Maju, Adil, dan Sejahtera”. Pada RPD tahun 2024-2026 tujuan dan prioritas pembangunan terletak pada RPJPD 2005-2024 periode 4 tahun pertama, yaitu **“Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing”**

Tema/fokus pembangunan periode 2024 yaitu **“Pemantapan ketahanan perekonomian daerah dan kondisi masyarakat harmonis yang didukung SDM berkualitas”**.

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
	gelandangan dan pengemis di luar panti	
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 3.3
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2024	Pelaksana
1	Tujuan SDGs 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan			
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.			
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	BPKAD, Inspektorat
2	Tujuan SDGs 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan			
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.			
	Maturitas SPIP	Nilai	3,150	Inspektorat

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk

3.3.4. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020

mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

3.3.5. Penanganan Inflasi

Kebijakan pengendalian inflasi adalah pengendalian terhadap rantai distribusi bahan-bahan baku dan pengendalian harga komoditas pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

INSPEKTORAT KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

PARAF KUORDINASI		
No.	Pejabat	Tgl.
1.	Pencanaan pau da	31/23 7
2.	Kabid Rencana	31/7 23
3	cabid ppm	31/7 23
4.		

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	11.305.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		18.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.085.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.842.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		18.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trnwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trnwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TrnwulananSemesteran SKPD				6 Laporan	11.270.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		12.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8.440.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6 01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.970.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		2.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.032.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	246.450.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		442.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				85 Unit	261.335.250,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		130.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				78 Unit	798.639.035,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		650.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	198.600.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	97.200.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	32.610.302,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	246.011.860,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peningkatan Ke- tentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	160.432.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	89.250.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Peni ngkatan Ke tentraman, Ketertiban Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		130.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				52 perangkat daerah	33.700.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP7 - Perin gkatan Ke tentraman, Keterlibatan Umum dan peningkata n kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatk an tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik dengan pe manfaatan teknologi informasi (e-gov)	-		90.000.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH							15.339.683.677,00							15.509.000.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
	NIHIL	

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2024)	Alokasi (2024)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	15.339.683.677

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	13.593.043,515
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	49.540
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	7.810
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	6.085

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Dokumen RKA-SKPD	SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.085
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.085
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.085
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	11.305
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.085
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 dokumen	17.730
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.440
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang	1 dokumen	2.440

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		Milik Daerah SKPD		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	2.440
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	8.440
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.970
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 dokumen	9.570.586,821
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	9.479.709,321
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	58.680
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	6.085
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	14.842,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	6 laporan	11.270

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		bulanan/triwulan/se mesteran SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55 dokumen	693.397,620
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	57.200
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	6.995
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	552.806,620
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	55 orang	76.396
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	51 dokumen	551.426,275
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	29.097,130
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	13.902,600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	16.759
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	188.706,195

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	32.478,850
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12.032,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	246.450
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	73 unit	1.719.456,499
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	659.482,214
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	40 unit	261.335,250
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	798.639,035
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	305.800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	10.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	198.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	4 laporan	97.200

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		kantor yang disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	94 unit	685.106,300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	197.606,200
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	15.750
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	95.356,100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	376.394
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60%	741.659,162
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	30 OPD	663.924,162
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%	
		Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	70%	
		Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	8 laporan	215.514

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		pemerintah daerah		
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	30.270
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	79.518
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	60.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	32.610,302
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	246.011,860
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	8 laporan	77.735
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	14.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	63.735
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	10%	1.004.981
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	2 kegiatan	249.682
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	160.432
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi	1 rekomendasi	89.250

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		pengawasan yang disusun		
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	52 OPD	755.299
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	325.822
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	46.670
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	349.107
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	33.700

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
		N I H I L				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001